



Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan Stabilitas Kawasan

Rizki Roza^{*)}

Abstrak

Sengketa kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara dua kekuatan ekonomi terbesar Asia, yaitu Cina dan Jepang, telah berlangsung sejak lama dan berulang kali memicu ketegangan hubungan diplomatik antara kedua negara. Namun perkembangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah mengkhawatirkan masyarakat internasional. Masyarakat internasional, tidak terkecuali Indonesia, harus mendorong kedua pihak bersengketa untuk menahan diri guna mencegah konflik yang lebih besar.

A. Pendahuluan

Sengketa kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut China Timur antara Cina dan Jepang telah berlangsung lama. Situasi yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir mengkhawatirkan masyarakat internasional. dengan terjadinya sejumlah insiden dan ketegangan hubungan diplomatik di antara kedua negara. Di tengah meningkatnya ketegangan terkait sengketa teritorial tersebut, China secara resmi mulai mengoperasikan kapal induk pertamanya, yang dinamakan Laioning. AS sebagai sekutu Jepang dan Taiwan dipastikan tidak akan tinggal diam bila situasi di kawasan Laut China Timur ini semakin memburuk dan berdampak pada negara-negara lainnya di kawasan. Bagaimana sesungguhnya persoalan yang dihadapi kedua negara tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan Kepulauan

Senkaku/Diaoyu? Mengapa sengketa tersebut kembali memicu ketegangan hubungan diplomatik kedua negara? Bagaimana dampak ketegangan hubungan diplomatik kedua negara terhadap kawasan? Bagaimana pula semestinya Indonesia merespon perkembangan tersebut?

B. Sengketa Kepemilikan Kepulauan

Ketegangan kedua negara berasal dari suatu kepulauan di perairan Laut Cina Timur. Kepulauan yang oleh Jepang dinamakan Senkaku, atau Diaoyu dalam versi Cina dan Taiwan, terdiri atas delapan pulau tak berpenghuni seluas 7 km². Meski kepulauan itu sebagian besar tak berpenghuni, namun kepulauan ini memiliki nilai strategis karena berada di jalur pelayaran yang sibuk, memiliki

^{*)} Peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: rizki.roza@dpr.go.id

populasi ikan yang besar, dan juga diduga mengandung deposit minyak yang berlimpah.

Sengketa kepemilikan kepulauan tersebut dimulai pasca Perang Dunia II. Tetapi dasar klaim masing-masing pihak sudah ada jauh sebelum itu. Setelah melakukan survey selama 10 tahun dan kemudian menetapkan bahwa pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni, pada 14 Januari 1895, Jepang mendirikan batas kedaulatan yang secara resmi memasukkan kepulauan Senkaku ke kawasan Jepang. Kepulauan Senkaku ditetapkan menjadi bagian dari kepulauan Nansei Shoto, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Ryukyu, dan sekarang disebut sebagai Okinawa. Selain itu, berdasarkan Traktat Shimonoseki tahun 1895 setelah Perang Cina-Jepang, Taiwan diserahkan kepada Jepang. Ini merupakan awal klaim kepemilikan Jepang atas Kepulauan Senkaku. Di sisi lain, Cina mengklaim Kepulauan Diaoyu telah berada di peta Cina sejak zaman Dinasti Ming (1368-1644), dan menjadi kawasan perikanan yang dikuasai Provinsi Taiwan. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan klaim itu terbukti dalam sejarah dan secara legal kuat.

Pasca-kekalahan Perang Dunia II, berdasarkan Traktat San Fransisco tahun 1951, Jepang melepas klaim-klaim atas sejumlah pulau dan kepulauan, termasuk Taiwan yang kemudian dikembalikan kepada Cina. Dalam pandangan Cina, Kepulauan Diaoyu—sebagai bagian dari Provinsi Taiwan—semestinya juga dikembalikan, namun Jepang menyanggah klaim tersebut karena beranggapan kepulauan tersebut merupakan bagian dari Nansei Shoto, bukan Taiwan.

Pada saat Kepulauan Nansei Shoto dimasukkan dalam kewenangan AS berdasarkan traktat San Fransisco 1951, menurut Jepang, pada saat itu Cina tidak menyatakan keberatan. Sehingga Jepang menilai klaim Cina sangat terlambat karena baru mulai muncul belakangan, baik oleh Cina maupun Taiwan, setelah diketahui kawasan itu kaya cadangan minyak bumi. Cina menyalahkan Taiwan yang tidak melakukan klaim. Cina menyanggah saat Perjanjian San Fransisco disepakati,

Pemimpin Kuomintang Chiang Kai Shek tidak mengangkat fakta sejarah. Menurut Cina, hal itu terjadi karena Chiang Kai Shek saat itu memang sangat tergantung pada dukungan AS. AS kemudian mengembalikan Kepulauan Nansei Shoto kepada Jepang pada tahun 1971, setelah AS mengakhiri pemerintahan pasca-Perang Dunia II atas Jepang.

Tokyo beranggapan, bahwa Cina dan Taiwan baru mulai mengklaim kepulauan tersebut sejak tahun 1970-an, saat isu sumber daya minyak diangkat. Persoalan mulai bertambah besar ketika laporan PBB pada tahun 1969 mengungkapkan adanya kandungan gas alam dan minyak di kawasan sengketa tersebut. Berdasarkan estimasi pemerintah Cina, terdapat sedikitnya 17,5 triliun kaki kubik gas alam dan 20 juta barel minyak di sana, setara dengan seperlima cadangan gas alam Cina. CNOOC selaku perusahaan Cina yang paling banyak menggarap kandungan gas laut di Laut China Timur telah mengidentifikasi enam ladang gas, yaitu Chunxiao, Tianwaitian, Duanqiao, Baoyunting, Canxue, dan Wuyunting. Secara keseluruhan enam ladang gas tersebut menyimpan 364 miliar kaki kubik gas alam.

C. Ketegangan Hubungan Diplomatik

Situasi yang berkembang saat ini telah menyebabkan ketegangan hubungan diplomatik yang merisaukan banyak pihak. Kondisi memburuk setelah Pemerintah Jepang secara resmi memutuskan untuk membeli dan mengalihkan kepemilikan Kepulauan Senkaku ke negara untuk bisa mengendalikan secara stabil dan damai. Merespon tindakan Jepang tersebut, Cina mengirimkan sejumlah kapal patroli ke wilayah sengketa sebagai bentuk penegasan atas kedaulatan negara. Ketegangan hubungan kedua negara meningkat drastis setelah pengiriman kapal Cina tersebut. PM Jepang membentuk satuan tugas untuk menangani masalah ini, dan juga memanggil duta besar Cina guna menyampaikan protes. Pengiriman enam kapal tersebut belum pernah terjadi

sebelumnya, mengingat insiden-insiden sebelumnya.

Aksi protes anti-Jepang meluas di Cina. Skala aksi demonstrasi kali ini merupakan yang terbesar sejak dua negara ini menormalisir hubungan diplomatiknya pada tahun 1972. Aksi unjuk rasa yang meluas tersebut telah memaksa beberapa perusahaan milik Jepang di Cina seperti Panasonic dan Canon untuk menghentikan operasi mereka, karena aksi-aksi tersebut diikuti pula dengan pengrusakan pada jaringan produksi dan juga serangan terhadap kepentingan usaha Jepang dalam protes anti-Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang berencana merelokasikan pabriknya ke luar China. Kedua negara melakukan pembatalan peringatan 40 tahun hubungan diplomatik kedua negara, yang semestinya dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012.

Jepang dan Taiwan juga terlibat insiden setelah kapal patroli Penjaga pantai Jepang dan kapal patroli penjaga pantai Taiwan saling berhadapan dan melakukan baku tembak meriam air. Menembakkan meriam air ke kapal resmi suatu negara bisa diartikan menyatakan perang kepada negara tersebut. Personel penjaga pantai Taiwan yang terlibat merupakan anggota pasukan elite bersenjata lengkap. Insiden tersebut menandai makin rumitnya situasi di kawasan kepulauan tak berpenghuni yang diperebutkan Jepang, Taiwan dan China tersebut.

D. Ancaman terhadap Stabilitas Kawasan

Ketegangan hubungan diplomatik antara Cina dan Jepang yang masih terus memburuk tersebut telah mendorong sejumlah pihak untuk bereaksi, di antaranya AS. Menhan AS, Leon Panetta mengunjungi Beijing untuk berbicara dengan Menhan Cina dan para pemimpin negara itu. Ia menyerukan pentingnya hubungan militer yang lebih erat antara AS dan Cina. Dalam kunjungannya ke Tokyo sebelumnya, Panetta memperingatkan bahwa konflik ini berpotensi untuk memburuk dan meminta kedua belah pihak agar menahan diri.

Kedatangan Panetta juga menandai titik kritis dalam hubungan Cina-Jepang akibat sengketa kepulauan Diaoyu/Senkaku.

Kedua negara merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia, sementara Asia merupakan kawasan dengan perekonomian paling dinamis di dunia dan merupakan mesin ekonomi dari perekonomian global. Setiap konfrontasi antara kedua negara segera memicu kekhawatiran internasional akan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia, yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak di tengah kerentanan pemulihan ekonomi global. Dan bagi Jepang sendiri, akan terancam menghadapi dampak ekonomi bila terus memburuk karena perusahaan-perusahaan Jepang terkena pengaruh langsung akibat unjuk rasa. Bagi Cina sendiri yang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan seharusnya berkembang dengan beragam investasi asing yang diterimanya, tentunya akan turut merasakan dampak buruk situasi yang berkembang terhadap perekonomiannya. Tingginya hubungan kerjasama sektor ekonomi antara Cina, Jepang, dan negara-negara anggota ASEAN, maka perekonomian ASEAN pun tidak akan luput dari dampak buruk jika kondisi ini terus berlarut-larut.

Selain dapat berdampak pada sektor ekonomi, ketegangan kedua negara tentunya dapat menjadi ancaman yang serius bagi stabilitas perdamaian dan keamanan kawasan dengan kemungkinan terjadinya konflik bersenjata di laut. Perjanjian keamanan antara AS – Jepang secara resmi telah menyatakan bahwa persoalan Senkaku berada dalam cakupan perjanjian aliansi AS – Jepang. Dengan demikian, jika kedua negara tidak mampu menahan diri dan memicu konfrontasi bersenjata maka akan melahirkan konflik yang jauh lebih luas dengan melibatkan kekuatan-kekuatan militer besar dunia, terutama AS.

Pada saat yang sama Jepang sendiri tengah bersengketa dalam masalah kepemilikan kepulauan Kuril dengan Rusia, dan Pulau Takeshima/Dokdo dengan Korea Selatan. Penyelesaian sengketa kepemilikan pulau Senkaku/Diaoyu ini akan menjadi acuan bagi penyelesaian sengketa dengan kedua negara tersebut.

E. Penutup

Sengketa kepemilikan Pulau Senkaku/Diaoyu telah membawa ketegangan di kawasan yang semakin dekat dengan konflik bersenjata. Mengingat cakupan perjanjian keamanan AS-Jepang yang di dalamnya juga memungkinkan keterlibatan militer AS jika terjadi konflik bersenjata, maka konflik ini sangat mungkin dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas, yang dapat berdampak buruk terhadap kawasan yang sedang mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat ini.

China dan Jepang adalah dua negara raksasa ekonomi dunia di Asia sehingga persengketaan berkepanjangan diantara keduanya bisa berdampak pada stabilitas ekonomi global. China dan Jepang juga merupakan mitra dagang bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Jika sengketa maritim ini semakin memanas, maka mau tidak mau akan berdampak pula pada stabilitas keamanan dan ekonomi baik regional maupun internasional. Oleh sebab itu, China dan Jepang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas keamanan, politik dan ekonomi di kawasan. Indonesia harus menyerukan agar China dan Jepang segera menyelesaikan sengketa teritorial secara damai demi menjaga stabilitas kawasan. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan parlemen Indonesia untuk memanfaatkan segala sumber daya diplomasinya, untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mengutamakan cara-cara damai dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Rujukan:

1. "AS Minta Asia Hindari Sengketa Wilayah," <http://internasional.kompas.com/read/2012/09/10/07251093/AS.Minta.Asia.Hindari.Sengketa.Wilayah>, diakses 20 September 2012.
2. "Acara 40 tahun hubungan Cina-Jepang dibatalkan," http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120923_cina_jepang.shtml, diakses 20 September 2012.
3. "China-Jepang Menegang, Menhan AS Akan Berkunjung, diakses 20 September 2012," <http://internasional.kompas.com/read/2012/09/14/14323239/China-Jepang.Menegang.Menhan.AS.Akan.Berkunjung>, diakses 20 September 2012.
4. "Perusahaan Jepang bekukan operasi di Cina," http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120917_china_japan_protests.shtml, diakses 20 September 2012.
5. "Pembelian pulau-pulau sengketa dikukuhkan Jepang," http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120910_japan_senkaku.shtml, diakses 20 September 2012.
6. "Unjuk rasa anti Jepang kembali digelar di Cina," http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120918_antijapansentiment.shtml, diakses 20 September 2012.